

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam proses demokratisasi di Indonesia ditandai dengan lahirnya sistem multipartai atau disebut dengan berbagai jenis partai. Sistem multipartai ini adalah sistem kepartaian yang memiliki banyak partai. Dalam proses demokratisasi, rakyat dipandang sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hal itu terlihat sesuatu yang diharapkan melalui pemilihan umum dimana rakyat memilih langsung orang yang akan duduk memimpin pemerintahan dengan masa jabatan yang sesuai dan berlaku.

Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah menikah mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum (dan pemilukada). Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka selalu dianggap tidak memiliki pengalaman memilih pada pemilu sebelumnya. Namun, ketidak adaan pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik, namun mereka tetap melaksanakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara.

Dalam pemilihan umum dimulai dengan pemilihan legislatif sampai pada dua kali seperti pemilihan Presiden bisa terlaksana dengan aman, jujur dan adil. Pemilu yang dilaksanakan secara langsung dengan memilih kandidat-kandidat yang kuat dan amanah dari calon legislatif maupun calon eksekutif, memberikan kebebasan kepada

rakyat untuk memilih kandidat yang akan dipilih sendiri. Sebuah kehidupan bangsa Indonesia yang demokratis selalu dilandasi prinsip bahwa rakyatlah yang berdaulat sehingga berhak terlibat dalam aktivitas politik.

Tidak cukup sampai disitu perubahan juga terjadi dalam proses seperti pemilihan presiden dan wakilnya dimana rakyatpun diberi kesempatan untuk dapat memilih secara langsung presiden dan wakilnya dengan pertimbangan-pertimbangan dari masing-masing pemilih. Pemilihan umum presiden dan wakilnya tersebut dilakukan dengan sistem dua putaran. Yang artinya, jika ada putaran pertama tidak ada calon yang memperoleh suara minimal yang ditentukan, akan diadakan putaran kedua dengan peserta dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Sehingga yang menjadi tujuan pokok adalah adanya pasangan calon yang terpilih yang mempunyai legitimasi atau surat keterangan yang membenarkan atau yang mengesahkan bahwa pemegang surat itu betul-betul calon pasangan tersebut kuat dengan perolehan suara 50% plus satu atau mayoritas mutlak. Seandainya pada putaran kedua tidak ada yang memperoleh suara 50% plus satu, yang akan dijadikan pertimbangan untuk menentukan pemenang adalah pemerataan dukungan suara ditingkat provinsi ataupun kabupaten atau kota.

Hal demikian juga sama dengan proses pemilihan pilkada serentak di Kabupaten Karawang bahwa proses pemilihan kepala daerah dan wakilnya dilakukan secara langsung sebagaimana proses pemilihan presiden dan wakilnya dalam pemilihan umum pada tanggal 19 April 2014 yang lalu, disamping itu pemilihan

kepala daerah serentak secara langsung ini juga merupakan sebuah peluang menciptakan pemerintah daerah yang bertanggungjawab.

Dalam penerapan kebebasan langsung itu juga data terwujud dalam pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara langsung di Kabupaten Karawang, pemilihan bupati dan wakilnya di Kabupaten Karawang dilaksanakan dengan serentak yang sama dengan kabupaten lainnya. Ketika berbicara mengenai birokrasi yang ada di Indonesia sangatlah sensitif, dengan adanya birokrasi maka masyarakat harus mengetahui mengenai sosialisasi politik. Sosialisasi politik dapat meningkatkan respons seseorang atau masyarakat dalam melihat rangsangan dan kehidupan politik, akibat dari rangsangan tersebut maka seseorang dapat melakukan partisipasi. Berkaitan dengan berbagai rangsangan bagi seseorang untuk melakukan partisipasi politik, adapun 5 penyebab rangsangan timbulnya gerakan kearah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya modernisasi disemua bidang yang menyebabkan masyarakat semakin banyak berpartisipasi dalam politik.
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sehingga timbul pertanyaan mengenai siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik yang mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru.
4. Konflik antar kelompok pemimpin politik. Bila muncul konflik antar elit, yang dicari adalah dukungan rakyat.

5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Hal ini sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. (Dzulkiyah Said, 2007:90).

Para pemilih pemula ataupun yang sudah lama memilih merupakan *rational voters* yang mempunyai tanggung jawab, kesadaran, kalkulasi, rasionalitas dan kemampuan kontrol yang kritis terhadap kandidat pilihannya, yang meninggalkan ciri-ciri tradisional *voters* yang fanatik, primordial dan irasional, serta berbeda dari *swinger voters* atau yang sudah berpengalaman yang selalu ragu-ragu dan berpindah-pindah pilihan politiknya. Pemilih yang didalamnya pemilih pemula merupakan pemilih yang bisa jadi berpotensi. Karena pemilih pemula adalah subjek partisipasi dan bukan subjek mobilisasi.

Pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih juga belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka harus memilih. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasan ini menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk dipengaruhi dan didekati dengan pendekatan materi politik kepentingan partai-partai politik. Ketidaktahuan dalam soal politik praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilu atau pilkada, membuat pemilih pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek. Pemilih pemula sering hanya dimanfaatkan oleh partai politik dan politisi atau tim suksesnya untuk kepentingan politiknya, misalkan digunakan untuk penggalangan masa.

Perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang biasanya masih labil dan apatis, pemilihan politiknya kurang, cenderung mengikuti kelompok sepermainan dan mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum. Ruang-ruang tempat dimana mereka belajar politik biasanya tidak jauh dari ruang yang dianggap memberikan rasa kenyamanan dalam diri mereka.

Adapun ruang-ruang tempat belajar politik tersebut yaitu, ruang keluarga. Didalam lingkungan keluarga mereka belajar berdemokrasi pertama kali, faktor keluarga sangat mempengaruhi cara pandang mengenai seluk-beluk kehidupan yang ada disekitarnya, termasuk pendidikan politik diperoleh pertamakali dari ruang keluarga. Keluarga mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi secara emosional, sehingga faktor orangtua bisa membentuk perilaku pemilih mereka yang pemula.

Pengaruh teman sebaya atau sepermainan, menjadi faktor yang harus dipertimbangkan, karena faktor eksternal ini bisa mempengaruhi informasi dan pendidikan politik. Teman sebaya atau sepermainan dipercaya tidak hanya bisa mempengaruhi persepsi dan tindakan positif tetapi juga dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan negative. Sehingga kecenderungan perilaku politiknya berpotensi bahwa suatu hal tersebut adalah sama baik itu sifatnya, tingkah lakunya dan karakteristiknya dengan perilaku politik teman dekatnya.

Media masa, terutama media masa televisi mampu menyajikan sumber informasi politik kepada pemilih pemula secara efektif dan efisien, dalam hal ini para remaja atau pemilih pemula dalam sehari bisa menghabiskan waktu berjam-jam didepan televisi, meskipun tidak selalu menonton program yang berkaitan dengan

politik, berselang-seling dengan hiburan yang ada di televisi, membedakan pemilih pemula dengan pemilih lainnya adalah soal pengalaman dan pengetahuan politik dalam menghadapi pemilu. Referensi yang dijadikan sandaran dalam melakukan pemilihan cenderung tidak stabil atau mudah berubah-ubah sesuai dengan informasi yang melingkarinya.

Hal itu penting karena pemilih pemula adalah pemilih yang ikut andil menentukan pemimpi di daerah tertentu. Perilaku pemilih pemula menjadi indikator kualitas demokrasi secara substansial pada saat ini dan masa yang akan datang. Karena kondisinya masih labil dan mudah diberikan wawasan politik dan demokrasi secara benar dan baik dari suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Maka pemilih pemula masih terbuka menjadi pemilih yang cerdas dan kritis dalam menentukan pemimpin di Karawang.

Dalam permasalahan ini perilaku pemilih pemula yang bernama Doni adanya pengaruh dari orangtua untuk memilih pilihan yang akan dipilih oleh orang tuanya, dalam pilkada serentak pada tahun 2015 tentunya perilaku Doni tersebut dapat dipengaruhi oleh orang tuanya sehingga apa yang dipilih oleh Doni tidak sesuai dengan hati nurani pilihan Doni, ini menunjukkan bahwa pengaruh ajakan keluarga sangat tinggi, sehingga apa yang ingin dipilih oleh Doni tidak sesuai dengan pilihan yang akan Doni pilih di pemilihan umum kepala daerah serentak di Kabupaten Karawang Kecamatan Pedes. (Doni Septianto sebagai informan terdahulu)

Adapun perilaku politik pemilih pemula yang dipengaruhi oleh ajakan temannya sendiri, dengan kosongnya pemikiran mengenai perpolitikan di Indonesia

khususnya yang terjadi pilkada serentak pada tahun 2015, Herdi dengan latar belakang yang tidak tahu tentang politik dengan status pemilih pemula yang tidak tahu mengenai peta politik ternyata dipengaruhi oleh temannya, ketika Herdi akan melakukan pencoblosan pilkada serentak, ternyata Herdi di pengaruhi oleh ajakan temannya untuk memilih apa yang temannya pilih, ini terjadi ketika pemilih pemula tidak mengetahui calon kandidat pilkada. (Herdi sebagai informan terdahulu)

Dalam uraian latar belakang diatas penulis melihat permasalahan perilaku politik pemilih pemula yang ada di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang. Dengan masih adanya pengaruh ajakan keluarga yang sangat tinggi dan pengaruh temannya, sehingga dapat menghasut perilaku politik pemilih pemula untuk menentukan pilihannya sesuai dengan apa yang akan dipilih oleh keluarganya, dapat terhasut atau terpengaruh dengan ajakan orangtuanya dan tidak memilih apa yang akan dipilih oleh pemilih pemula dan awamnya pendidikan atau pengetahuan politik, kemudian lemahnya pengetahuan pemilih pemula terhadap pilkada.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian ***“Perilaku Politik Pemilih Pemula di Era Pilkada Serentak”***. (Studi di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang).

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan data empiris dari hasil observasi, baik secara formal maupun non formal terdapat masalah-masalah dalam sosiologi politik diantaranya :

1. Kurangnya kesadaran individu terhadap pentingnya pendidikan politik bagi dirinya sendiri.

2. Kurangnya sosialisasi politik yang dilakukan lembaga tertentu terhadap pemilih pemula.
3. Masyarakat yang sudah merasa nyaman dan terbiasa dengan ketidaktahuannya dalam ilmu politik dan pilkada.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Pedes pada Pemilukada Serentak di Kabupaten Karawang Tahun 2015?
2. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku politik pemilih di Kecamatan Pedes pada pemilukada serentak di Kabupaten Karawang Tahun 2015?
3. Sejauh mana partai politik mempengaruhi perilaku pemilih pemula di kecamatan Pedes pada pemilukada serentak di Kabupaten Karawang Tahun 2015?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Pedes pada Pemilukada Serentak di Kabupaten Karawang Tahun 2015.

2. Untuk mengetahui sejauh mana partai pengaruh partai politik mempengaruhi perilaku pemilih pemula di kecamatan Pedes pada pemilukada serentak di Kabupaten Karawang Tahun 2015.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih di Kecamatan Pedes pada pemilukada serentak di Kabupaten Karawang Tahun 2015.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat akademik
 - a. Sebagai bahan informasi ilmiah untuk para peneliti lain yang ingin melihat perilaku pemilih pemula dalam pemilukada.
 - b. Memperkaya khasanah kajian ilmu politik dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan.
 - c. Menjelaskan fenomena sosial politik yang ada.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai bahan untuk membantu para pelaku politik, dan sumbangan pemikiran dalam memperkokoh demokratisasi di berbagai daerah.
 - b. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian-penelitian ditempat lain.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk melihat perilaku politik pemilih pemula Pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi dan juga pendidikan yang menyeluruh kepada masyarakat upaya menjadikan masyarakat yang cerdas, paham dan mengerti untuk memilih calon

kepala daerah. Dan juga kurangnya interaksi pemerintahan setempat dengan masyarakat mengakibatkan sebagian masyarakat kurang paham dengan intansi pemerintahan diharapkan pemerintah dapat mengatasi keditaktahuan atau kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik pilkada.

Oleh sebab itu pemerintahan harus bisa berbaur dan sosialisasi untuk menciptakan masyarakat yang paham, cerdas dalam menentukan pilihan dengan cara mengadakan pendidikan politik pilkada. perilaku sosial individu dan juga masyarakat kecenderungan peranan (*role disposition*) dapat dikatakan memadai, manakala menunjukkan ciri-ciri respons interpersonal dan personal di antaranya; yakin akan kemampuannya dalam bergaul secara sosial, memiliki pengaruh yang kuat terhadap teman sebaya, mampu memimpin teman-teman dalam kelompok dan, tidak mudah terpengaruh orang lain dalam bergaul.

Tindakan sosial bagi Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain (Ritzer, 1992: 86).

Weber seterusnya membedakan empat jenis tindakan;

1. Perbuatan *zweckrational* atau tindakan rasional yang berhubungan dengan suatu cita-cita. Suatu tindakan dikatakan rasional kalau pelakunya mengandaikan bahwa penggunaan beberapa usaha tertentu perlu untuk mencapai sesuatu cita-cita. Tindakan *zweckrational* adalah bentuk tindakan rasional yang original, melibatkan pertimbangan secara rasional mengenai

hubungan suatu cita-cita dengan usaha untuk mencapainya. Contoh pelakuan ini adalah tindakan seorang jurutera dalam pembangunan sebuah jambatan.

2. Tindakan werirational atau tindakan rasional berhubungan dengan suatu nilai. Ini merupakan tindakan-tindakan yang tidak memandang bahaya atau kerugian semata-mata untuk mempertahankan kehormatan seorang atau mencapai suatu nilai. Misalnya tindakan seorang kapten yang tidak mau melarikan diri ketika kapalnya mengalami kecelakaan.
3. Tindakan yang bercorak tradisi merupakan tindakan yang ditentukan oleh tradisi dan adat istiadat. Pelaku-pelaku melakukan sesuatu seperti yang ditentukan oleh tradisi tanpa memikirkan hubungan diantara cita-cita dengan usaha. Contoh tindakan bercorak tradisi adalah upacara agama.
4. Tindakan emosi atau efektif. Tindakan yang ada akibat reaksi emosi seseorang dalam keadaan tertentu. Perilaku refleksi adalah contoh tindakan emosi. Tindakan ini juga meliputi reaksi yang tidak terkontrol akibat suatu rangsangan (stimulus).

Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran

